



**KLARIFIKASI BPKP
TERKAIT
PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN BPKP
MELALUI UNDANGAN SEMINAR NASIONAL/BIMTEK**

Sehubungan dengan beredarnya surat undangan seminar nasional/bimtek yang mengatASNamakan Sekretaris Utama BPKP (terlampir), di mana Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman diundang untuk mengikuti kegiatan Seminar Nasional/Bimtek bertema “Tantangan Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Mewujudkan *Good Governance* untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disertai kewajiban membayar kontribusi sebesar Rp5.500.000,- untuk keperluan akomodasi penginapan, ruang *meeting*, *coffee break*, perlengkapan seminar, narasumber, dokumentasi kegiatan, pengadaan materi, dan konsumsi selama acara.

Kepada seluruh pihak yang mendapatkan surat undangan tersebut, kami tegaskan bahwa “BPKP TIDAK PERNAH BEKERJA SAMA DENGAN PUSDIKLATWAS LIPI MAUPUN HOTEL MANAPUN TERKAIT AKOMODASI DAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS TANTANGAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH.”

Terkait hal tersebut, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk Pimpinan Instansi yang menerima surat undangan kegiatan tersebut untuk **MENGABAIKANNYA**, karena hal itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Apabila masyarakat, termasuk Pimpinan Instansi menerima undangan seperti di atas, dapat melaporkannya ke Call Center/Whatsapp BPKP Kawal +62852-8320-0100, e-mail kawal.akuntabilitas@bpkp.go.id, Twitter @bpkpgoid, Instagram @bpkpkawal / @bpkp_id, atau lapor.go.id.

Demikian kami sampaikan agar masyarakat waspada dan terhindar dari penipuan.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT UTAMA

Nomor : S-737/SU/04/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 6 (enam) Dokumen
Perihal : Undangan Seminar Nasional/Bimtek

Jakarta, 02 Maret 2022

Kepada Yth,-

PENIPUAN

an

T e m p a t,-

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dan kolaborasi memperkuat kerjasama dalam bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan korupsi bagi para legislator mesti dioptimalkan. Pasalnya, sektor politik adalah salah satu sektor yang sangat beresiko terkena kasus korupsi, komitmen tersebut menjadi landasan yang kuat untuk KPK dalam menyusun rencana strategis upaya penguatan sistem antikorupsi yang komprehensif. Dalam rangka upaya meningkatkan Good Governance yang berkelanjutan dan berkesinambungan Pusdiklatwas mengadakan Seminar Nasional / Bimtek bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada dasarnya, konsep *Good Governance* muncul sebagai turunan demokrasi, dimana demokrasi itu sendiri merupakan mekanisme pemerintahan yang mana keputusan pemerintahan didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan *Good Governance* perlu dibangun hubungan efektif antar pelaku, agar semua merasa memiliki tata pengaturan tersebut.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berperan aktif dalam mengawasi segala sesuatu yang menyangkut dalam pengelolaan aset dan keuangan negara / daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana kendala dan upaya dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. BPKP sangat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan *good governance* dan *good corporate governance*. Peran BPKP sebagai badan yang mengelola keuangan dan pembangunan tubuh pemantauan pengendalian dan pemantauan proses manajemen pemerintahan yang umumnya ditempatkan sebagai bagian dari Presiden otoritas. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh BPKP berdominan dengan kurangnya SDM untuk mengatasi pengelolaan keuangan di daerah dengan demikian upaya yang dilakukan adalah penambahan SDM untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mengawasi pengelolaan keuangan guna menghindarkan adanya KKN, penyelewengan serta hambatan lainnya yang bertujuan untuk menghindarkan kerugian yang terjadi untuk negara. Implementasi *good governance* di daerah tidak dapat dilepaskan dari peran DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dan Anggaran. Peran dan fungsinya dalam bidang pengawasan bertambah menarik perhatian umum karena citra pemerintahan yang buruk dengan syaratnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. DPRD berkewajiban untuk senantiasa menjalankan fungsi pengawasannya terhadap aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh eksekutif. Sebab, fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan ciri utama dari negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi).

Dengan diselenggarakan Seminar Nasional/Bimtek dua hari melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) diharapkan akan mendapat arahan berdasarkan pada kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta kami mengundang untuk mendapatkan insight dari para *stakeholders* Pimpinan DPRD, anggota DPRD, Setwan yang terkait dalam rangka pengawasan pemerintah daerah.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT UTAMA

B. Tema Seminar/Bimtek

Dalam Seminar Nasional/Bimtek dua hari ini dengan mengambil tema “**Tantangan Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**” Yang dapat ditinjau dari berbagai bidang : Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perekonomian, Keuangan, Pemerintahan, Pembangunan Nasional, Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum, Legislatif, Akademisi Hukum dan Ekonomi.

C. Waktu dan Tempat

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa s.d Kamis, 22 – 24 Maret 2022

Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 – 14.45 WIB (selesai)

Tempat : The Alana Hotel & Conference Center (Emerald Ballroom)

Jl. Ir. H. Juanda No. 76, Sentul City, Bogor 16810

Agenda : Terlampir

Dress Code hari pertama pakaian batik dan wanita menyesuaikan

Hari kedua pakaian bebas dan menaati standar protokol kesehatan Covid 19 yang ketat.

D. Peserta dan Biaya

Demi sukseskan kegiatan ini setiap peserta Seminar Nasional/Bimtek membayar kontribusi sebesar **Rp. 3.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel/Penginapan, Ruang Meeting, Coffee Break, Perlengkapan Seminar, Narasumber, Dokumentasi Kegiatan, Pengandaan Materi, dan Konsumsi selama acara.

Kontribusi kegiatan dapat di transfer ke **Rekening Bank Mandiri No : 167-00-0463999-6 Bendahara Panitia Pusdiklatwas – LIPI a.n Yuli Wiyarsih SE, Kantor Cabang Bekasi Bintara**. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran kontribusi peserta di tempat registrasi dan pengisian daftar hadir / absensi peserta. Sesuai yang disepakati bersama pembayaran hanya dapat dilakukan dengan sistem transaksi secara non tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Utama – Pusdiklatwas**

Djoko Toto Sukarta, SE, M.Ak, HP 0811185587

Donita Sri Astuti, Ak, MH., CFE HP 0811115565 / 0811299935 (whatsapp)

Alexander Benny, SE, MBA HP 0811275959

Humas Fax. 021 – 85901568 / 0251 - 8243005

Pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional/Bimtek dua hari pembayaran biaya kontribusi peserta di audit Lembaga Independent Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama

Ernadhi Sudarmanto, Ak, MM, M.Ak
NIP 19650704 198503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala BPKP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

JADWAL SEMINAR NASIONAL/BIMTEK KERJASAMA PUSDIKLATWAS - LIPI

**Sesi I Rabu, 23 Maret 2022
The Alana Hotel & Conference Center, Emerald Ballroom
Jl. Ir. H. Juanda No.76, Sentul City, Bogor 16810**

TEMA : Tantangan Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Penerima Tamu	The Alana Hotel & Conference Center Emerald Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan Seminar/Bimtek	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Utama BPKP	Ernadhi Sudarmanto, Ak, MM	
09.25 – 09.40	Keynote Speech dan Pembuka Seminar/Bimtek	Kepala BPKP Dr. M. Yusuf Ateh, Ak, MBA	
09.40 – 09.55	COFFEE BREAK		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian: Dr. Ir. (H.C) Airlangga Hartarto, MBA, MMT (Menteri Koordinator Perekonomian RI) 2. Perspektif Monitoring dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara: Dr. Agus Wardono, SH, MH (Komisi Pemberantasan Korupsi RI) 3. Perspektif mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah: Dr. Mochamad Ardian N, M.Si (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) 4. Perspektif Interaksi antara hukum dan politik dalam proses legislasi yang berlaku dalam masyarakat: Dr. Sigit Riyanto, SH, M.Si (Guru Besar Hukum Politik Universitas Indonesia) 5. Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam membentuk suatu peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia: H. Ahmad Doli Kurnia T (Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)	Moderator: Pengamat Politik LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA	
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Penutupan		



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

JADWAL SEMINAR NASIONAL/BIMTEK KERJASAMA PUSDIKLATWAS - LIPI

**Sesi II Kamis, 24 Maret 2022
The Alana Hotel & Conference Center, Emerald Ballroom
Jl. Ir. H. Juanda No. 76, Sentul City, Bogor 16810**

TEMA : Tantangan Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penerima Tamu	The Alana Hotel & Conference Center Emerald Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan Seminar/Bimtek	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Utama BPKP	Emadhi Sudarmanto, Ak, MM	
09.25 – 09.40	Keynote Speech dan Pembuka Seminar/Bimtek	Ph. Kepala LIPI Dr. Agus Haryono, M.Sc	
09.40 – 09.55	COFFEE BREAK		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien: Dr. (HC) Ir. H. Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI) 2. Perspektif pengawasan terhadap pelaksanaan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan: Dr. Wahyu Sudarmanto, SH, MH (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) 3. Perspektif mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan : Isa Rachmatarwata, M.Math (Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu RI) 4. Perspektif membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan : Prof. Dian Masyita (Guru besar ekonomi Universitas Padjajaran) 5. Perspektif DPD RI mengawasi sinergitas yang terjalin antar pemerintah daerah dan mitranya untuk kepentingan nasional: H. Fachrul Razi, MIP (Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)	Moderator: Pengamat Politik LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA	
12.45 – 13.45	B R E A K		
13.45 – 14.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
14.30 – 14.45	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak Pusdiklatwas - LIPI	
14.45	Pemberian Sertifikat	Pihak Pusdiklatwas – LIPI	

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (Tentatif)
Penyelenggaraan seminar nasional/bimtek mengacu pada aturan dan perundang undangan



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720

Telepon (0251) 8249551 – 3 Fax. (0251) 8243005

e-mail: pusdiklatwas@bpkpri.go.id web: <http://pusdiklatwas.bpkpri.go.id>

**LEMBAR KONFIRMASI KESEDIAAN MENJADI PESERTA
SEMINAR NASIONAL/BIMTEK DUA HARI KERJASAMA PUSDIKLATWAS - LIPI**

Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

PENIPUAN

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** untuk menjadi peserta Seminar Nasional/Bimtek dua hari kerjasama Pusdiklatwas - LIPI

.....2022

Peserta,

1. Batas waktu pendaftaran dan pembayaran konfirmasi nama peserta paling lambat hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sebelum penyelenggaraan kegiatan seminar nasional/bimtek dilaksanakan.
2. Lembar konfirmasi dan tanda bukti transfer biaya kontribusi peserta diharapkan dapat dikirim melalui whatsapp/email untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
3. Panitia pelaksana tidak melayani dan menerima peserta seminar/bimtek yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme, tidak terdaftar dalam penetapan peserta dan membawa sertifikat Vaksin.
4. Invoice/kwitansi asli bercap dan bermaterai diserahkan panitia bendahara di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Panitia Seminar Nasional /Bimtek

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN - LIPI

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720

Telepon (0251) 8249551 – 3 Faksimili (0251) 8243005

Email: pusdiklatwasri.lipi@gmail.com

Djoko Toto Sukarta, SE, M.Ak 0811185587

Donita Sri Astuti, Ak, MH., CFE 0811115565 / 0811299935 (Whatsapp)

Alexander Benny, SE, MBA 0811275959





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720

Telepon (0251) 8249551 – 3 Fax. (0251) 8243005

e-mail: pusdiklatwas@bpkpri.go.id web: <http://pusdiklatwas.bpkpri.go.id>

KWITANSI

RECEIPT

No. _____ : S-273/DL/1/2022.

Number

Telah terima dari _____ : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Received From

Sejumlah uang _____ :

Amount received

Untuk pembayaran _____ :

In payment of

() Peserta Seminar Nasional/Bimtek dua hari dengan biaya kontribusi setiap Peserta Rp. 5.500.000 (Lima Jula Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari Selasa s.d Kamis Tanggal 22 - 24 Maret 2022 dengan tema "Tantangan Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju Yang Beradilait, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

PENIPUAN

Catatan :

1. kontribusi kegiatan ditransfer ke rekening :
Bank Mandiri Kantor Cabang Bekasi Bintara
A/C 167-00-0463999-6
a.n Yuli Wiyarsih SE Bendahara Panitia Pusdiklatwas – LIPI
2. Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui Whatsapp / email

Jumlah Rp. _____

Jakarta, 04 Maret 2022



Ririn Hardianti Widjaja, SE, M.Ak
Kepala Subkoordinator Keuangan

ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University